

## Panglima TNI: Nakes Jantung Sistem Kesehatan Nasional

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, tenaga kesehatan merupakan jantung sistem kesehatan nasional. Hal itu disampaikan Hadi saat melantik 122 Perwira Prajurit Karier (khusus tenaga kesehatan) di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/11). "Tenaga kesehatan merupakan jantung dari sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu diperlukan perhatian kepada pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan guna menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat," ujar Hadi, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11).

Hadi mengatakan, para Perwira akan kembali dituntut untuk segera siap melaksanakan tugas. Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, PPNI Minta Nakes dan Masyarakat Berjuang Bersama Hadapi Pandemi Covid-19 Program pendidikan selanjutnya harus dapat dikombinasikan dengan pengabdian langsung di tengah masyarakat bila diperlukan.

"Di situh letak perwujudan dari kode etik Perwira, Budhi Bhakti Wira Utama, Sapta Marga, Sumpah Pra-

jurit dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam menapaki kehidupan keprajuritan," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Hadi juga mengatakan para Perwira merasakan sendiri bagaimana pendidikan harus menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 dan tuntutan tugas. "Lembaga pendidikan dan siswanya harus beradaptasi, kita semua harus beradaptasi," tegasnya.

Perwira yang meraih predikat berprestasi ditaji matra yaitu Letda CKM dr. Lambang Ksatria Bregas (TNI AD) mendapat penghargaan Trisura Jalu Wiratama, Letda Laut (K) dr. Wiliam Sugiharto (TNI AL) mendapat penghargaan Trisura Jalu Wiratama dan Letda Kes dr. Nadief Akbar Azzami (TNI AU) mendapat penghargaan Trisura Jalu Wiratama.

Sedangkan dari wanita Letda CKM (K) dr. Made A Sinta Mahastuti mendapat penghargaan Trisura Wanodya Wiratama. 122 Perwira Khusus Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2021 tersebut terdiri dari 62 Perwira TNI AD, 40 Perwira TNI AL, dan 20 Perwira TNI AU. ● han

## Pangdam XVII/Cenderawasih Berikan Penghargaan Kasad ke 5 Prajurit Berprestasi

JAYAPURA (IM) - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI, Ignatius Yogo Triyono, memberikan Piagam Penghargaan Kasad dalam Lomba Pembinaan Teritorial (Binter) TA 2021 dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Operasi Militer Selain Perang (OMSP) kepada personel Kodam XVII/Cenderawasih yang berprestasi.

Pemberian penghargaan bertempat di Aula Tony A. Rompis, Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis (11/11). Saat memberikan penghargaan, Pangdam XVII/Cenderawasih mengatakan Binter sebagai fungsi utama memiliki peran sangat penting sebagai katalisator antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga aparat teritorial yang mengawaki harus memiliki keterampilan untuk dapat mengaplikasikan pelaksanaan Binter agar lebih berkualitas dan bermanfaat bagi terciptanya situasi kondusif di wilayah.

"Salah satu upaya pimpinan TNI AD untuk mengukur kinerja tiap Kodim adalah dengan cara melakukan kompetisi yang diikuti oleh seluruh Kodim jajaran TNI AD. Dalam pelaksanaan lomba tersebut, Kodim 1712/Sarmi berhasil mendapat penghargaan dari Bapak Kasad sebagai Juara II Lomba Binter Kodim Tipe C. Dengan prestasi tersebut kita patut bersyukur dan bangga karena ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme dari Satuan Komando Kewilayahan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih," jelas Ignatius.

"Saya ucapkan selamat kepada Letkol Inf Rizky Marlon Silalahi Dandim 1712/Sarmi Korem 172/PWY atas prestasi yang telah dicapai," kata Ignatius menambahkan.

Ignatius mengungkapkan

## KPK Telusuri Uang Rp1,5 Miliar Saat Penangkapan Dodi Alex Noerdin

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami barang bukti uang Rp 1,5 miliar yang ditemukan saat menangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Pendalaman itu dilakukan melalui seorang penasihat hukum Soesilo Aribowo yang diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih pada Kamis (11/11).

"Tim penyidik mengonfirmasi yang bersangkutan antara lain terkait dengan barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan tersangka DRA (Dodi Reza Alex Noerdin)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Jumat (12/11).

Dodi Alex Noerdin KPK akan terus mendalami uang Rp 1,5 miliar yang ditemukan dalam sebuah tas dari penangkapan Dodi Reza Alex Noerdin pada Jumat (15/10).

Adapun Dodi ditangkap di salah satu lobi hotel di Jakarta dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap infrastruktur.

rasa bangganya berkenaan terdapat empat prajurit Kodam XVII/Cenderawasih yang dapat melaksanakan tugas binter dengan baik. Hal ini terbukti dengan prestasi mendapatkan 5 (Lima) pucuk senjata api tanpa letusan peluru.

"Berkaitan dengan prestasi tersebut, saya memberikan penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dari Bapak Kasad kepada keempat prajurit Kodim 1715/Yahukimo, yaitu Eduardo Alfonsius Dimara pangkat lama Sertu menjadi Serka, Ruben Alexander Sinai pangkat lama Sertu menjadi Serka, Ari Neson Merahabia pangkat lama Serda menjadi Sertu dan Hendri Yoktan Tenggara pangkat lama Kopda menjadi Koopu," terangnya.

Prestasi yang telah diperoleh diharapkan dapat meningkatkan motivasi, semangat dan dedikasi untuk memberikan pengabdian terbaik kepada Kodam XVII/Cenderawasih. Selain itu, diharapkan juga prestasi tersebut dapat menjadi contoh dan suri teladan bagi keluarga besar Kodam XVII/Cenderawasih untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.

Hadir dalam pemberian penghargaan, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, Irdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Wachid Apriliyanto, Kapoksahli Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Heru Setyo, Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan, Danrindam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Vivin Alivianto, para Staf Ahli, Asisten dan Kabalad Dam XVII/Cenderawasih beserta Ketua Persit CCK Daerah XVII/Cenderawasih Ny. Natalia Yogo Triyono beserta pengurus. ● mei

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## PUAN MAHARANI KUNJUNGI PETANI DI BANYUWANGI

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) memanen padi bersama petani di persawahan Banjar, Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (12/11). Pada kunjungannya, Puan berdialog dengan petani untuk menyerap aspirasi serta memberikan sejumlah bantuan pertanian dan kartu wisata ramah difabel.

# KPK Hentikan Kasus Formula E jika Tak Ditemukan Unsur Pidana

KPK menegaskan siapa pun yang mengetahui terkait keseluruhan rencana penyelenggaraan Formula E akan diminta keterangan oleh tim penyelidik KPK.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghentikan penyelidikan kasus dugaan

korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta jika memang tidak ditemukan unsur pidananya.

Diketahui, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pada penyelenggaraan balap Formula E yang akan dihelat di DKI Jakarta.

"Jadi, penyelidikan ini yang

dicari adalah peristiwa pidananya dulu. Apakah ada atau tidak, kalau kemudian tidak ada (peristiwa pidananya) ya tidak dilanjutkan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan.

Dia melanjutkan, pada prinsipnya proses penyelidikan itu ialah mencari peristiwa pidana. Ali mengungkapkan proses itu nantinya akan ditemukan saat pengumpulan data, informasi, dan bahan keterangan.

"Nanti ketika mencari peristiwa pidana ini ada pengumpulan data, informasi, dan bahan keterangan," ujar Ali.

Oleh sebab itu, Ali menegaskan siapa pun yang mengetahui terkait keseluruhan penyelenggaraan Formula E ini akan dipanggil. Setelah itu,

diminta keterangan oleh tim penyelidik KPK.

"Untuk memastikan apakah benar di dalam penyelenggaraan ini ada peristiwa pidana," tandas Ali.

Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah menyerahkan dokumen setebal 600 halaman tentang Formula E ke KPK pada Selasa, 9 November 2021 lalu.

Dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat dan Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto serta didampingi oleh Ketua TGUPP Bidang Penegakan Hukum Bambang Widjojanto dan mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. ● han

## Operasi Prostat yang Dijalani SBY di Amerika Serikat Berjalan Lancar

JAKARTA (IM) - Upaya penyembuhan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari penyakit kanker prostat membuahkan hasil. Setelah menjalani operasi, SBY dinyatakan berjalan lancar. Hal itu diungkapkan anak bungsunya SBY, Edhie Basukoro Yudhoyono (EBY). "Operasi berjalan dengan lancar," tutur Ibas sapaan akrab Edhie Basukoro Yudhoyono sembari diamini oleh sang istri Aliya dan istri AHY, Annisa Pohan, seperti dikutip dari Instagram AHY, Jumat (12/11).

AHY juga mengatakan, hadir juga sahabat Bapak SBY, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto beserta istri, yang ikut memberikan dukungan

moril kepada beliau, sebelum pelaksanaan operasi.

"Atas nama keluarga besar Yudhoyono, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak/Ibu dan saudara-saudara masyarakat Indonesia, atas simpati dan doa baiknya untuk kesembuhan Bapak SBY," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada hari Kamis, 11 November 2021, pukul 07.45 waktu Rochester, Bapak SBY melaksanakan tindakan operasi atas kondisi kesehatannya di RS Mayo Clinic. Kurang lebih pukul 10.00, operasi dinyatakan selesai.

AHY dan Edhie Basukoro Yudhoyono mendampingi seluruh proses, mulai dari mengantar SBY operasi pasca-operasi ke

ruang perawatan dan pemulihan di RS St Marys, yang lokasinya masih dalam lingkungan kompleks RS Mayo Clinic.

Sesuai dengan diagnosis dari tim dokter, SBY mengalami kanker prostat (prostate cancer) SBY pun melakukan tindak lanjut ke luar negeri untuk segera mengobati kanker prostat yang dialaminya dirinya.

Setelah dilakukan konsultasi yang mendalam dengan tim dokter Indonesia, termasuk para urolog senior, diputuskan medical treatment dilakukan di sebuah rumah sakit di luar negeri yang memiliki pengalaman panjang dan teknologi yang maju untuk menangani kanker prostat, yaitu RS Mayo Clinic. ● han

## Kepatuhan Prokes Institusi di 63 Kabupaten/Kota di Bawah 35%

JAKARTA (IM) - Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi mengungkapkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan Institusi di 63 kabupaten/kota di Indonesia di bawah 35%.

Fakta ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, apalagi menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang berpotensi mengalamai lonjakan kasus Covid-19.

"Jadi tantangan sekarang adalah data kami menunjukkan bahwa 63 kabupaten kota di Indonesia itu institusinya tidak patuh ya. Bahkan, kepatuhan protokol kesehatannya di bawah 35 persen. Ini menjadi PR," ungkap Sonny dalam dialog secara virtual, Jumat (12/11).

Sementara itu, Sonny mengatakan dari 514 Kabupaten Kota di seluruh Indonesia hanya 136 Kabupaten Kota yang tingkat kepatuhan protokol kesehatannya di atas 85 persen. "Data kami menunjukkan hanya ada 136 kabupaten kota di Indonesia dengan kepatuhan institusi di atas 85 persen," kata Sonny.

Sonny menjelaskan, ketika ada institusi yang tidak patuh, dia tidak memfasilitasi atau tidak memudahkan orang untuk melaksanakan protokol kesehatan, ini berdampak terhadap ketidakpatuhan masyarakat secara keseluruhan dalam hal protokol kesehatan.

"Oleh karenanya kita terus mendorong adanya Satgas Institusi perkuatan penangan Covid-19 termasuk

perkuatan ya, protokol kesehatan dipantau secara terus menerus," paparnya.

Sonny mengatakan bahwa kepatuhan institusi itu misalnya apakah mereka menyediakan tanda-tanda jaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan petugas untuk mengukur suhu, menyediakan petugas untuk pengawas pemakaian masker, menyediakan masker cadangan dan seterusnya.

"Jadi semua level di kabupaten kota, di level komunitas, dan di level institusi itu diperkuat. Ditambah lagi kami terus menerus memperkuat di level keluarga dengan mendorong agar setiap keluarga menjadi garda terdepan di dalam kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan," kata Sonny. ● han



## BANTUAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL DI JAYAPURA

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) disambut oleh Rektor Universitas Cenderawasih Appolo Safanpo (kedua kiri) saat memberikan bantuan ATENSI di Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Jumat (12/11). Kementerian Sosial memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 539 orang dan bantuan program pemberdayaan sosial kepada 5 lembaga dengan total bantuan Rp 30,07 miliar di Provinsi Papua.

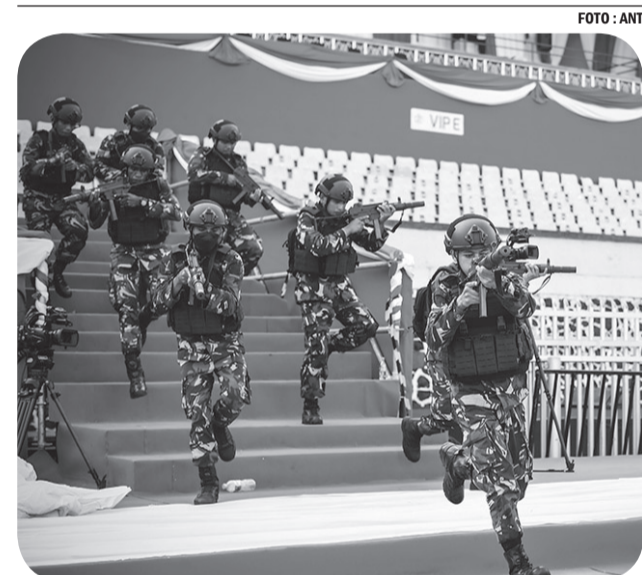


FOTO: ANT

## PERSIAPAN PENUTUPAN PEPARNAS PAPUA

Sejumlah anggota TNI melakukan persiapan penutupan Peparناس Papua di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Jumat (12/11). Peparناس Papua rencananya ditutup oleh Presiden Joko Widodo pada 13 November 2021.

## Berkas Perkara Dua Tersangka Kasus Suap di Hulu Sungai Utara Dinyatakan Lengkap

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada tim jaksa.

Adapun dua tersangka itu adalah Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi.

"Hari ini, tim jaksa menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dari tim penyidik karena pemberkasan perkara tersangka MRH (Marhaini) dan FH (Fachriadi) telah dinyatakan lengkap," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis, Jumat (12/11).

Ipi mengatakan, penahanan Marhaini dan Fachriadi dilanjutkan lagi oleh tim Jaksa selama 20 hari kedepan terhitung mulai 12 November 2021 sampai dengan 1 Desember 2021.

Marhaini ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih dan Fachriadi ditahan di Rutan KPK pada kavling C1.

"Dengan tenggang waktu 14 hari kerja, tim jaksa segera menyusun dan melimpahkan berkas perkara yang Pengadilan Tipikor," ucap Ipi.

"Pelaksanaan persidangan diagendakan di Pengadilan

Tipikor Banjarmasin," katanya.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara Maliki sebagai tersangka.

Adapun ketiga tersangka itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Rabu (15/9) malam.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta. Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan 3 Tersangka Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

Sedangkan Maliki selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP. ● lus